

Peran Pendidikan Islam dalam Konteks Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi

Martoyo^{1*}, Rino Pambudi²

¹⁻² Jurusan Pendidikan Agama Islam, STAI Ibnurusyd, Indonesia

martoyoir2023@gmail.com^{1*}, rinopambudi15@gmail.com²

Korespondensi penulis: martoyoir2023@gmail.com

Abstract: *Islamic education has a strategic role in shaping the character and morals of students in line with the principles of democracy. This article aims to examine how democratic values such as equality, justice, deliberation, and tolerance can be instilled through the process of Islamic education, both formally in educational institutions and in non-formal contexts such as religious studies and socio-religious activities. With a qualitative descriptive approach and literature study, this study shows that Islamic education can be an effective instrument in instilling democratic values through the integration of religious teachings, teacher role models, and strengthening the curriculum that encourages dialogue, freedom of thought, and respect for differences. Instilling democratic values in Islamic education is not only relevant to the development of national character, but also becomes an important foundation in forming a civilized civil society.*

Keywords: *character, deliberation, Islamic education, tolerance*

Abstrak: Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan akhlak peserta didik yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, keadilan, musyawarah, dan toleransi dapat ditanamkan melalui proses pendidikan Islam, baik secara formal di lembaga pendidikan maupun dalam konteks nonformal seperti kajian agama dan kegiatan sosial keagamaan. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan studi pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui integrasi ajaran agama, keteladanan guru, dan penguatan kurikulum yang mendorong dialog, kebebasan berpikir, dan penghargaan terhadap perbedaan. Menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam tidak hanya relevan bagi pengembangan karakter bangsa, tetapi juga menjadi landasan penting dalam membentuk masyarakat madani yang beradab.

Kata kunci: karakter, musyawarah, pendidikan Islam, toleransi

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan karakter individu dan masyarakat (Muahfudin, 2017). Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak-hak individu, Islam memberikan dasar moral yang kokoh untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis (Dera Nugraha, 2021). Nilai-nilai seperti toleransi, dan kesetaraan dalam kehidupan sosial sejalan dengan ajaran Islam, yang menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab moral terhadap sesama. Namun, bagaimana pendidikan Islam dapat mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi secara efektif menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan pendekatan terencana.

Dalam ajaran Islam, nilai-nilai demokrasi seperti keadilan dan musyawarah sangat menonjol, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip syura (musyawarah) adalah landasan penting yang menjadi refleksi dari konsep demokrasi, di mana keputusan

diambil melalui proses dialog yang melibatkan berbagai pihak (Mutmainah & Kamaluddin, 2019). Pendidikan Islam memiliki peluang besar untuk menanamkan nilai-nilai ini melalui kurikulum yang tidak hanya berbasis pada ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika. Dengan demikian, generasi yang dihasilkan dari pendidikan Islam dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan demokratis.

Namun, penerapan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya persepsi bahwa demokrasi adalah konsep yang berasal dari Barat, sehingga terkadang dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, kurikulum pendidikan Islam di beberapa tempat masih cenderung terfokus pada aspek-aspek dogmatis dan belum sepenuhnya menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi seperti toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Hal ini dapat menghambat proses internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan peserta didik (Mawidha & Fajr Mawidha, 2022).

Meski demikian, peluang besar tetap ada untuk mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam. Salah satu caranya adalah melalui pendekatan kontekstual yang mengaitkan ajaran Islam dengan realitas kehidupan sosial masyarakat. Dengan menekankan pentingnya keadilan sosial, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam ajaran Islam, pendidikan Islam dapat menjadi alat yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi. Guru dan pendidik memainkan peran penting dalam proses ini, melalui metode pengajaran yang interaktif dan dialogis.

Selain itu, lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun nonformal, dapat menjadi pusat pemberdayaan nilai-nilai demokrasi melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, simulasi musyawarah, dan pengembangan program ekstrakurikuler yang berbasis pada prinsip partisipasi dan toleransi. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, asalkan mampu menghadapi tantangan yang ada dengan strategi yang terencana dan kontekstual. Dengan integrasi nilai-nilai demokrasi ke dalam sistem pendidikan Islam, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, adil, dan sejahtera. Maka makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep nilai-nilai demokrasi dalam perspektif Islam, menganalisis peran pendidikan Islam dalam penanaman

nilai-nilai tersebut, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam konteks ini

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Nilai-Nilai Demokrasi dalam Perspektif Islam?
- b. Bagaimana Peran Pendidikan Islam dalam Menanamkan Nilai-Nilai Demokrasi ?

2. PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Demokrasi dalam Perspektif Islam

Nilai-nilai demokrasi dalam perspektif Islam sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, terutama yang berkaitan dengan toleransi, keadilan, musyawarah dan kesetaraan. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama di hadapan Allah SWT, terlepas dari status sosial, etnis, atau gender. Prinsip ini menjadi dasar dari nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan. Berikut penjelasan nilai-nilai demokrasi dalam sudut pandang Islam.

a. Toleransi

Toleransi adalah nilai fundamental dalam Islam yang menekankan sikap saling menghormati dan menerima perbedaan di antara manusia. Dalam Islam, toleransi mencakup berbagai aspek, termasuk keyakinan, budaya, dan pandangan hidup. Prinsip ini tercermin dalam QS. Al-Kafirun: 6, yang menyatakan, "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." Ayat ini menjadi bukti bahwa Islam mengajarkan penghormatan terhadap keberagaman agama tanpa paksaan dalam berkeyakinan, sesuai dengan ajaran kebebasan individu yang juga merupakan nilai demokrasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi adalah kunci untuk menjaga harmoni sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap baik kepada tetangga, teman, dan bahkan kepada mereka yang berbeda agama atau pandangan. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan melalui hubungan baik dengan komunitas non-Muslim di Madinah, seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi adalah contoh nyata dari penerapan toleransi, di mana semua kelompok agama diberikan hak yang sama untuk hidup damai dalam satu masyarakat.

Toleransi juga mengajarkan penghormatan terhadap hak-hak individu. Dalam Islam, tidak ada paksaan dalam beragama sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 256, "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama..." Ini menunjukkan bahwa setiap individu bebas untuk memilih keyakinannya tanpa tekanan. Prinsip ini sangat

relevan dalam konteks demokrasi modern, di mana kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi menjadi hak fundamental yang dilindungi.

Meskipun toleransi adalah nilai yang luhur, implementasinya sering menghadapi tantangan, terutama di masyarakat yang majemuk. Perbedaan budaya, agama, atau ideologi sering kali menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya toleransi untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Islam menekankan dialog sebagai sarana untuk menyelesaikan perbedaan, bukan melalui konfrontasi atau kekerasan. Sehingga toleransi merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis. Dengan mengedepankan toleransi, umat Islam dapat menunjukkan bahwa ajaran Islam relevan dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai ini tidak hanya memperkuat hubungan antarindividu, tetapi juga menjadi dasar bagi hubungan antaragama dan antarbangsa di dunia modern.

b. Keadilan

Salah satu nilai inti demokrasi dalam Islam adalah keadilan, yang menjadi landasan utama dalam hubungan sosial, politik, dan hukum. Dalam Islam, keadilan tidak hanya berarti memberi hak kepada individu sesuai porsinya, tetapi juga menegakkan kebenaran dan menghindari segala bentuk ketidakadilan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan melalui ayat, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90). Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah perintah langsung dari Allah SWT dan menjadi dasar perilaku umat Islam.

Keadilan dalam Islam bersifat universal, mencakup seluruh manusia tanpa memandang latar belakang sosial, agama, atau etnis. Konsep ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan hak setiap individu. Dalam konteks masyarakat, keadilan memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menikmati manfaat dari kebijakan yang diberlakukan. Dengan cara ini, Islam menawarkan landasan moral bagi implementasi demokrasi yang inklusif dan adil.

Dalam sistem pemerintahan, keadilan menjadi pedoman utama dalam menjalankan kekuasaan. Pemimpin dalam Islam dianggap sebagai pelayan masyarakat yang harus menegakkan keadilan tanpa bias. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian..." (HR.

Muslim), menegaskan bahwa keadilan menjadi kunci dalam menjaga hubungan harmonis antara pemimpin dan rakyat.

Selain itu, Islam mendorong penerapan keadilan dalam hubungan antarindividu, termasuk dalam transaksi bisnis dan kehidupan sehari-hari. Prinsip ini mencerminkan bahwa keadilan tidak hanya relevan dalam ranah politik, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi. Misalnya, keadilan dalam berdagang berarti menghindari praktik curang dan memberikan hak kepada pihak lain sebagaimana mestinya. Konsep ini mengakar kuat dalam prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang mendukung distribusi sumber daya secara adil.

Secara keseluruhan, keadilan dalam Islam tidak hanya menjadi nilai inti, tetapi juga menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis. Dengan menempatkan keadilan sebagai prioritas, Islam memberikan pedoman praktis bagi individu dan masyarakat untuk menciptakan tatanan sosial yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya. Integrasi nilai ini dalam kehidupan sehari-hari dapat memperkuat praktik demokrasi yang tidak hanya adil secara prosedural tetapi juga substantif.

c. Musyawarah

Musyawarah, atau syura dalam Islam, merupakan nilai demokrasi yang sangat fundamental, mengajarkan pentingnya partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Asy-Syura: 38, “Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...”. Ayat ini menempatkan musyawarah sebagai metode utama dalam menentukan kebijakan atau keputusan yang berdampak pada orang banyak. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menghargai keterlibatan seluruh pihak dalam menentukan masa depan bersama.

Musyawarah mengutamakan keterbukaan dan penghargaan terhadap pendapat setiap individu. Dalam Islam, semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam menyampaikan pandangannya, tanpa memandang status sosial, etnis, atau gender. Nilai ini memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan memperhatikan kepentingan bersama. Musyawarah tidak hanya menjadi alat pengambilan keputusan, tetapi juga berfungsi memperkuat rasa solidaritas dan persatuan di antara anggota masyarakat.

Praktik musyawarah dalam Islam tidak terbatas pada aspek pemerintahan, tetapi juga diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di lingkungan keluarga, musyawarah digunakan untuk menyelesaikan masalah secara kolektif. Di tingkat

masyarakat, musyawarah menjadi alat untuk menjaga harmoni sosial dan mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan konflik. Sedangkan di tingkat pemerintahan, musyawarah menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil, dengan memperhatikan aspirasi rakyat.

Musyawarah juga mencerminkan penghormatan terhadap perbedaan pendapat dan tanggung jawab bersama. Proses ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang lebih inklusif, tetapi juga mendorong setiap individu untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat. Nilai-nilai seperti toleransi, keterbukaan, dan penghargaan terhadap pandangan berbeda merupakan inti dari musyawarah, menjadikannya salah satu elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang demokratis.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa musyawarah menjadi wujud nyata dari prinsip demokrasi dalam Islam. Melalui musyawarah, umat Islam dapat mewujudkan tatanan sosial yang adil dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kontribusi dalam pembangunan bersama. Dengan mengintegrasikan nilai musyawarah ke dalam praktik kehidupan modern, Islam menunjukkan relevansinya dalam memperkaya tata kelola masyarakat dan pemerintahan.

d. Kesetaraan

Kesetaraan adalah salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam dan demokrasi. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama, baik di hadapan Allah SWT maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa semua manusia adalah setara seperti gerigi pada sisir, tanpa membedakan warna kulit, etnis, atau status sosial. Pernyataan ini menegaskan bahwa kesetaraan merupakan pondasi dari hubungan manusia dalam Islam.

Kesetaraan dalam Islam tidak hanya berlaku pada aspek spiritual, tetapi juga sosial. Islam menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga keadilan, menciptakan kesejahteraan, dan membangun kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang memberikan setiap individu hak yang setara dalam menentukan arah kehidupan bersama, seperti berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memilih pemimpin.

Dalam konteks sejarah, kesetaraan dalam Islam tampak nyata dalam hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Beliau tidak pernah membedakan perlakuan terhadap orang kaya dan miskin, pemimpin dan rakyat biasa, atau antara laki-laki dan perempuan dalam hal penghormatan hak dan kewajiban.

Demokrasi modern juga mengadopsi prinsip ini, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan lainnya.

Namun, penerapan kesetaraan ini tidak selalu mudah, baik dalam sistem Islam maupun demokrasi. Tantangan sering muncul dari budaya, tradisi, dan sistem yang sudah mengakar, yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya kesetaraan sebagai pilar untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan adil.

Dengan mempraktikkan kesetaraan, Islam menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak dan suara yang sama dalam menentukan masa depannya. Kesetaraan tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap kemanusiaan, tetapi juga menjadi dasar untuk menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan bebas dari diskriminasi. Integrasi nilai ini dalam kehidupan sehari-hari memperkuat esensi demokrasi dan relevansi ajaran Islam dalam membangun tatanan sosial yang lebih baik.

Peran Pendidikan Islam dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi

a. Integrasi Nilai dalam Kurikulum

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui integrasi prinsip-prinsip tersebut dalam kurikulum. Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, musyawarah, toleransi, dan kesetaraan merupakan bagian dari ajaran Islam yang secara alami dapat diadopsi dalam proses pendidikan. Kurikulum berbasis nilai ini tidak hanya bertujuan untuk membentuk individu yang cerdas secara intelektual tetapi juga berkarakter moral dan sosial, sehingga mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat demokratis.

Langkah pertama dalam integrasi ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam ajaran Islam. Misalnya, nilai musyawarah sebagaimana diajarkan dalam QS. Asy-Syura: 38 dapat dimasukkan dalam pembelajaran tentang pengambilan keputusan. Selain itu, nilai keadilan yang diungkapkan dalam QS. An-Nisa: 135 dapat menjadi dasar untuk diskusi tentang pentingnya perlakuan yang setara terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang.

Selanjutnya, pendidikan Islam harus menggunakan metode pembelajaran yang mendukung partisipasi aktif siswa. Misalnya, diskusi kelompok, debat, dan simulasi musyawarah dapat digunakan untuk melatih siswa mengemukakan pendapat secara konstruktif dan menghargai pandangan orang lain. Proses ini melatih siswa untuk

menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat pemahaman mereka tentang nilai-nilai Islam.

Selain itu, pendidikan Islam juga harus mendorong siswa untuk memahami dan menghormati perbedaan. Nilai toleransi dapat diajarkan melalui interaksi dengan berbagai budaya dan agama di sekitar mereka. Dengan cara ini, siswa belajar untuk hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam, sejalan dengan prinsip rahmatan lil 'alamin yang diajarkan dalam Islam. Penting pula untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui keteladanan dari guru dan lingkungan sekolah. Guru sebagai figur otoritas harus menunjukkan sikap adil, terbuka, dan menghargai perbedaan. Lingkungan sekolah yang demokratis, di mana siswa dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang relevan, juga dapat memperkuat pembelajaran nilai-nilai tersebut.

Dalam implementasinya, pendidikan Islam harus menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma bahwa Islam dan demokrasi adalah dua hal yang bertentangan. Oleh karena itu, penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa nilai-nilai demokrasi sejati, seperti keadilan dan musyawarah, telah menjadi bagian dari ajaran Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan Islam yang terintegrasi dengan nilai demokrasi dapat membuktikan bahwa kedua konsep ini tidak hanya kompatibel, tetapi juga saling memperkuat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam kurikulum, pendidikan Islam tidak hanya melahirkan individu yang unggul secara akademis tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Hal ini menjadi kontribusi penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis, adil, dan demokratis, sekaligus memperkuat posisi Islam sebagai panduan kehidupan yang relevan di era modern.

b. Penerapan dalam Praktik Pembelajaran

Penerapan nilai-nilai demokrasi dalam praktik pembelajaran menuntut proses yang mengedepankan partisipasi aktif siswa, keterbukaan dalam komunikasi, serta penghargaan terhadap keberagaman pendapat. Dalam konteks pendidikan Islam, langkah ini mencakup penggunaan metode dan pendekatan pembelajaran yang sejalan dengan prinsip musyawarah, toleransi, dan keadilan, yang merupakan nilai-nilai inti demokrasi sekaligus bagian integral dari ajaran Islam.

Salah satu bentuk penerapan dalam pembelajaran adalah melalui diskusi kelompok. Guru dapat membagi siswa ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu topik, kemudian mengarahkan mereka untuk mengambil keputusan bersama. Pendekatan ini mencerminkan praktik musyawarah sebagaimana diajarkan dalam

Islam, di mana siswa dilatih untuk mendengar, mengemukakan pendapat, dan mencapai konsensus yang saling menguntungkan.

Simulasi demokrasi, seperti pemilihan ketua kelas atau pengambilan keputusan berbasis suara mayoritas, juga menjadi metode yang efektif. Dalam kegiatan ini, siswa belajar tentang tanggung jawab, hak suara, dan pentingnya menghormati keputusan bersama meskipun mungkin berbeda dengan pendapat pribadi. Aktivitas ini memperkuat pemahaman mereka tentang konsep keadilan dan partisipasi yang aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Toleransi dapat diajarkan melalui pembelajaran lintas budaya atau agama, di mana siswa dikenalkan dengan tradisi dan pandangan yang berbeda. Guru dapat menggunakan media seperti video, cerita, atau kunjungan ke tempat ibadah yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya saling menghormati perbedaan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam sebagai agama yang menghargai keberagaman.

Penerapan nilai-nilai demokrasi juga harus didukung oleh sikap guru yang menjadi teladan dalam bersikap adil dan menghargai pendapat siswa. Guru yang membuka ruang dialog dengan siswa dan mengakomodasi aspirasi mereka menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan demokratis. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan tetapi juga pembentukan karakter siswa yang mampu menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

c. Pendidikan Karakter dan Moral

Pendidikan karakter dan moral merupakan komponen penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik dan bermoral. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam Islam, pendidikan karakter dan moral ini disebut sebagai tarbiyah akhlakiyah, yang mengacu pada pembentukan akhlak mulia berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Penerapan pendidikan karakter dan moral dapat dilakukan melalui pembelajaran yang integratif, baik di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah. Guru berperan sebagai teladan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan memberikan contoh nyata, siswa akan lebih mudah memahami dan meniru perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan. Dalam kurikulum pendidikan Islam, pembelajaran akhlak dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran

seperti fiqih, tafsir, dan sejarah Islam. Misalnya, kisah-kisah Nabi dan para sahabat dapat digunakan untuk mengilustrasikan pentingnya sifat sabar, jujur, dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penguatan nilai-nilai ini juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti program pengabdian masyarakat atau pelatihan kepemimpinan.

Pendidikan karakter dan moral juga harus melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Kerjasama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan sosial penting untuk menciptakan konsistensi dalam pembentukan karakter siswa. Misalnya, kegiatan seperti parenting class atau forum komunikasi antara guru dan orang tua dapat membantu menyelaraskan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dan di rumah. Dengan pendidikan karakter dan moral yang efektif, siswa tidak hanya mampu mengatasi tantangan kehidupan dengan bijaksana, tetapi juga berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pendidikan ini menjadi fondasi untuk membangun generasi yang tidak hanya kompeten secara intelektual tetapi juga memiliki integritas dan tanggungjawab.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda, yang sangat relevan dengan tantangan sosial-politik di era modern. Nilai-nilai demokrasi keadilan, musyawarah, kesetaraan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan. Melalui pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi ini, pendidikan Islam tidak hanya membentuk individu yang cerdas secara intelektual tetapi juga berkarakter moral dan sosial yang kokoh, sehingga mereka mampu berperan aktif dalam masyarakat yang demokratis. Peran pendidikan Islam dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi melalui 3 langkah yaitu integrasi nilai dalam kurikulum, penerapan dalam praktik pembelajaran dan pendidikan karakter dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Dera Nugraha. (2021). Nilai-nilai moderasi beragama di pondok pesantren. *Jurnal Al Amar*, 2(1), 43–51.
- Fatimah, S., Eliyanto, E., & Huda, A. N. (2022). Internalisasi nilai-nilai religius melalui blended learning. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3(2), 169. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i2.14569>
- Gruchy, M. J. W. De. (2019). Visi profetis kehidupan sosial umat Kristen dalam demokrasi. *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, 3(2), 118–132.
- Haslita, R., Samin, R., Kurnianingsih, F., Okparizan, O., Subiyakto, R., Elyta, R., Anggraini, R., Muhazinar, M., & Ardiansya, A. (2021). Implementasi kebijakan pada kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 81–86. <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3845>
- Hujaimah, S., Fadhilah, A. A., Fiqri, R., Sasmita, P., Salsabila, N., Mariani, M., Nugraha, D. M., & Santoso, G. (2023). Faktor, penyebab, dan solusi kesenjangan sosial dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 2(6), 142–148.
- Ilham. (2019). Model sinergisitas lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 3(2), 236–258. <https://doi.org/10.52266/tadjud.v3i2.298>
- Ledang, I. (2019). Tradisi Islam dan pendidikan humanisme: Upaya transinternalisasi nilai karakter dan multikultural dalam resolusi konflik sosial masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1, 105–128.
- Manik, S. (2016). Etika dan permasalahan dalam pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 15(2), 71–88. <https://doi.org/10.24114/jik.v15i2.6141>
- Mawidha, R. F., & Fajr Mawidha, R. (2022). Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pelaksanaan pembelajaran Akidah Akhlak kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi tahun pelajaran 2021/2022. *April*, 8.
- Muahfudin, R. (2017). Konsep pendidikan holistik dalam perspektif Islam. *Jakarta: Jurnal Studi Al-Qur'an Universitas Negeri Jakarta*, 13(2), 461–482. <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v3i05.42>
- Munawwaroh, E. I. (2021). Media “audio visual” untuk pembelajaran kemahiran menulis (Imla’). *Insyirah: Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan Studi Islam*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.26555/insyirah.v4i1.4182>
- Musdalifah, M. (2023). Implementasi pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di madrasah. *Al-Miskawaih: Journal of Science Education*, 2(1), 47–66. <https://doi.org/10.56436/mijose.v2i1.221>

Mustofa, B. (2016). *Al-Ibris*. Maktabah Menara Kudus.

Mutmainah, D., & Kamaluddin, K. (2019). Peran guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membentuk sikap dan kepribadian siswa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 44. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i2.673>

Riyadi, S., Nuswantoro, P., Merakati, I., Sihombing, I., Isma, I., & Abidin, D. (2023). Optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia dalam konteks pendidikan inklusif di sekolah. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 270–278.

Susanto, R., Rohmah, W., Hidayanti, S. N., & Sugiyar, S. (2023). Interreligious harmonization (Analytic study of Kalicinta Village, Kotabumi, Lampung). *Jurnal Kodifikasia: Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya*, 17(1). <http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v17i1.5729>

Wekke, I. S. (2017). Harmoni sosial dalam keberagaman dan keberagaman masyarakat minoritas Muslim Papua Barat. *Kalam*, 10(2), 295. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i2.3>